

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkisar 6% per tahun belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin masih tinggi, yang saat ini berkisar 31 juta jiwa atau 13% pada tahun 2010. Studi dari Bank Dunia dikutip dari Sri Liani Suselo dan Tasidim menyebutkan bahwa “hampir 50% dari jumlah penduduk Indonesia dikategorikan miskin dan berada di ambang kemiskinan”¹. Hal ini menjadikan permasalahan kemiskinan patut mendapat perhatian besar dari semua pihak.

Menurut Nasikun dalam Ginanjar Kartasasmita, kondisi yang sesungguhnya harus dipahami mengenai kemiskinan:

kemiskinan adalah sebuah fenomena multifaset, multidimensional, dan terpadu. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup di dalam kondisi kekurangan sandang, pangan, dan papan. Hidup dalam kemiskinan seringkali juga berarti akses yang rendah terhadap berbagai ragam sumber daya dan aset produktif yang sangat diperlukan untuk dapat memperoleh sarana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang paling dasar².

Hidup dalam kemiskinan sering kali juga berarti hidup dalam alienasi, akses yang rendah terhadap kekuasaan, dan oleh karena itu pilihan-pilihan hidup yang sempit dan pengap.

¹ Sri Liani Suselo dan Tasidim, “Kemiskinan Di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Moneter*, Vol. 11, No. 2, Juni 2008, pp. 157-181.

² Ginanjar Kartasasmita, *Kemiskinan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), p. 27

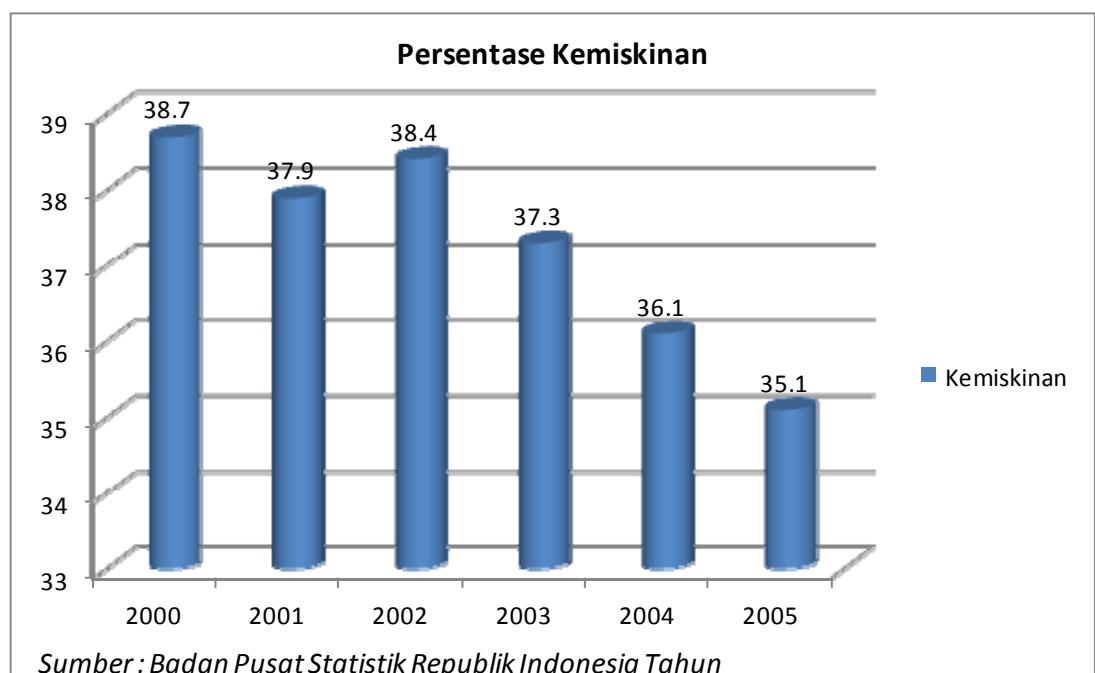
Permasalahan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia saat ini terkait dengan adanya fakta bahwa pertumbuhan ekonomi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia, ini dibuktikan dengan tingginya ketimpangan pendapatan antar daerah. kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena tingginya angka pengangguran, meningkatnya pengangguran terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah disebabkan karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan demikian seterusnya, sehingga membentuk sebuah lingkaran kemiskinan sebagai sebuah hubungan sebab dan akibat (teori Nurkse) dan telah dibuktikan untuk contoh kasus lingkaran kemiskinan di Indonesia.

Masalah kemiskinan terjadi karena adanya kekurangan akan kebutuhan pangan, rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya fasilitas layanan kesehatan serta kesempatan kerja yang mana semua unsur tersebut saling berkaitan sehingga mengakibatkan kualitas hidup menjadi rendah atau tidak tercukupinya kebutuhan hidup.

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting, tercantum dalam GBHN 2000-2004 dan Propenas 2001-2004 yang menyatakan bahwa pemerintah mengindikasikan masalah kemiskinan sebagai salah satu masalah utama pembangunan nasional. Dalam kedua dokumen tersebut disebutkan bahwa pembangunan pada hakekatnya adalah upaya untuk menanggulangi kemiskinan.

Menurut *World Bank* tahun 2004, sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan dan tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).

Dalam programnya seperti meningkatkan mutu pendidikan, fasilitas kesehatan yang memadai, serta penyediaan lapangan pekerjaan, Zainuddin Basri dalam Ravi Wijayanto, “pemerintah secara kuantitatif telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 54,2 juta (40,1%) pada tahun 1976 menjadi 34,01 juta (11,3%) pada tahun 1996”³.



Gambar I.1 Persentase Kemiskinan di Indonesia

Setelah puncak krisis dilalui dan ekonomi mulai pulih, angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kembali turun. Pada tahun 2000 tingkat kemiskinan masih sebesar 38,70 juta jiwa atau 19%. Di tahun

³ Ravi Dwi Wijayanto, *Pengaruh PDRB dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan* (Semarang : Universitas Diponegoro), p.3.

2002 angka kemiskinan naik dari 16% menjadi 17,8%. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) “kenaikan tingkat kemiskinan saat itu sangat dipengaruhi oleh tingginya inflasi yang disebabkan kombinasi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan gejolak harga pangan, terutama beras”⁴.

Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS-RI) menggambarkan bahwa, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Kegiatan pembangunan diarahkan pada pembangunan daerah, khususnya daerah yang angka kemiskinannya terus naik dari waktu ke waktu.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2000, Indonesia memiliki 205 juta lebih penduduk. Sensus Penduduk pada tahun 2010, penduduk meningkat sebesar 32 juta penduduk atau menjadi 237 juta jiwa. Dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 3,2 juta orang per tahun atau, 266 ribu orang perbulan atau 9.142 orang perhari atau 380 orang per jam atau 6 orang per menit. Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Jumlah penduduk yang tidak bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

⁴ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, “Angka Kemiskinan”, *Berita TNP2K*, November 2010, p. 2.

Pembangunan di masing-masing provinsi di Indonesia, pemerintah serius melakukan pembangunan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah sejalan dengan pembangunan nasional yang ditetapkan. Salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. “Hal ini menjelaskan bahwa salah satu kriteria utama pemilihan sektor andalan pembangunan nasional adalah efektivitas dalam penurunan jumlah penduduk miskin”⁵.

Terbitan statistik Indonesia tahun 2010 menunjukkan tingkat kemiskinan di tiga puluh tiga provinsi di Indonesia mengalami fluktuasi pada tiap tahunnya. Peringkat pertama ditempati oleh Provinsi Papua dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 37.99 persen, peringkat kedua ditempati oleh Provinsi Irian Jaya Barat dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 36.26 persen, peringkat ketiga ditempati oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 24.88 persen. Provinsi yang baru disahkan, Banten dengan rata-rata tingkat kemiskinan 8 persen dan Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 4 persen sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan paling rendah.

⁵ Pantjar Simatupang dan Saktyanu K. Dermoredjo, “Produksi Domestik Bruto, Harga, dan Kemiskinan”, *Media Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 51, No. 3, Maret 2003, pp. 191 – 324.

Tabel I.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Penduduk Miskin
di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin
2006	39.300.000	17,8
2007	37.170.000	16,6
2008	34.960.000	15,4
2009	32.530.000	14,2
2010	31.020.000	13,3

Sumber : BPS-RI tahun 2010

Melihat data kemiskinan seperti di atas, jelas bahwa sejak dilakukannya sensus penduduk miskin tahun 1976 sampai sekarang ini sebenarnya besar kecil jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penduduk miskin, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yakni Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Pada umumnya komponen GKM (komoditi makanan kebutuhan pokok) manusia memegang peranan lebih besar dibandingkan dengan GKBM (sandang, papan, perumahan, dan kesehatan).

Tabel I.2
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Menurut Daerah, Maret 2009-Maret 2010

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp)
Perkotaan			
Maret 2009	11.910.000	10,72	222.123
Maret 2010	11.100.000	9,87	232.989
Perdesaan			
Maret 2009	20.620.000	17,35	179.835
Maret 2010	19.930.000	16,56	192.354

Sumber : Berita Resmi Statistik Indonesia 2010 (Data diolah dari Susenas)

Dalam kurun waktu setahun terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan turun sebesar 0,79 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,85 persen. Secara absolut selama periode Maret 2009 – Maret 2010, penduduk miskin di pedesaan berkurang 690.000 orang sementara di perkotaan turun sebanyak 810.000 orang.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian tahun 1995 yang dilakukan pada tujuh belas provinsi di Indonesia. Propinsi tersebut antara lain: Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku dan Irian Jaya. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan masyarakat pedesaan di

Indonesia. Salah satunya adalah rendahnya penerapan teknologi yang ditunjukkan dengan rendahnya penggunaan *input* serta mekanisme pertanian yang diterapkan.

Menurut Sahdan dalam Nasir, Sachudin dan Maulizar, menyebutkan variabel penyebab kemiskinan antara lain : pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan, kepemilikan alat produktif yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi. M. Dawam Rahardjo dalam bukunya yang berjudul “Menuju Indonesia Sejahtera” juga menyebutkan diantaranya adalah kualitas pendidikan dan tingkat pengangguran. Kemiskinan disebabkan karena menganggur akibat pendidikan yang rendah, sehingga tidak memperoleh penghasilan

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu daerah. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* atau paling tidak dapat membaca dan menulis.

Indikator pendidikan di Indonesia yang direpresentasikan oleh angka melek huruf (AMH). Tabel 1.3 memperlihatkan bahwa Angka Melek Huruf di Indonesia meningkat di tahun 2007 dengan 91,87% dari tahun 2006 sebesar 91,45%. Peningkatan angka melek huruf hanya 0,42% persen selama 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan angka melek huruf.

Tabel I.3
Angka Melek Huruf Di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	% Angka Melek Huruf
2006	91,45
2007	91,87
2008	92,19
2009	92,59
2010	92,91

Sumber : BPS – Susenas (2006-2010)

Indikator tingkat pendidikan selain angka melek huruf untuk mengukur pendidikan penduduk di suatu wilayah adalah dengan menggunakan rata-rata lama sekolah. Berdasarkan Tabel 1.4 rata-rata lama sekolah di Indonesia meningkat dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dikarenakan masih cukup besarnya penduduk yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar. Komitmen pemerintah diperlukan untuk mewujudkan jangka panjang Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Tabel 1.4
Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Di Indonesia Tahun 2006-2010

Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
2006	7.4
2007	7.5
2008	7.5
2009	7.7
2010	7.9

Sumber : BPS-RI 2010

Selain faktor teknologi dan pendidikan, masalah kemiskinan dari tahun ke tahun adalah masih tingginya jumlah angka pengangguran. Pengangguran dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu unsur yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat terwujud.

Tabel I.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Indonesia 2010

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2006	10,28
2007	9,11
2008	8,39
2009	8,14
2010	7,41

Sumber :Berita Resmi Statistik-BPS RI Berbagai Periode

Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Indikator yang biasa digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang didalamnya terdapat pengangguran sukarela yang akan digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan tabel I.5, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 cenderung menurun.

Jumlah pengangguran pada Februari 2010 mencapai 8,59 juta orang atau 7,41 persen dari total angkatan kerja. Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka cenderung menurun, dimana TPT Februari 2010 sebesar 7,41 persen turun dari TPT Februari 2009 sebesar 8,14 persen. Pada periode 2010, TPT untuk pendidikan Diploma mendominasi, yaitu sebesar 15,71 persen.

Jika dibandingkan keadaan Februari 2009 TPT untuk semua tingkat pendidikan mengalami penurunan, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan Diploma dan Sarjana yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,33 persen dan 1,3 persen, hal ini diduga karena lapangan kerja yang tersedia belum mensyaratkan pendidikan tinggi. Tahun 2010, TPT untuk pendidikan Diploma mendominasi, yaitu sebesar 15,71 persen.

Tabel I.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008–2010

Pendidikan yang Ditamatkan	2008	2009	2010
SD Kebawah	4,70	4,51	3,71
SMP	10,05	9,38	7,55
SMA	13,69	12,36	11,90
SMK	14,80	15,69	13,81
Diploma I/II/III	16,35	15,38	15,71
Universitas	14,25	12,94	14,24
Total	8,46	8,14	7,41

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 33/05/Th. 6 XIII, 10 Mei 2010

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpendapatan tinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional.

Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 12% hingga 17% pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan dikatakan merata⁶.

Ravi Dwi Wijayanto tahun 2010 dalam penelitiannya tentang pengaruh PDRB, pendidikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa variabel PDRB negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pendidikan juga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dian Oktaviani tahun 2001 dalam analisisnya tentang bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia menemukan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, yang artinya bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran di Indonesia maka jumlah penduduk miskin di Indonesia juga akan semakin bertambah seiring pertambahan jumlah pengangguran. Selain itu Deni

⁶ Dumary, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), p. 15.

Tisna tahun 2008 dengan penelitian yang sama juga menghasilkan hasil yang sama pula, yaitu bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Yang mana penelitiannya menggunakan metode *panel data* tahun 2003 - 2004.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, di Indonesia dalam periode 2006-2010 terjadi fenomena penurunan tingkat kemiskinan, tetapi terjadi peningkatan juga pada tingkat pendidikan yang dilihat dari rata-rata lama sekolah serta penurunan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun. Karena pentingnya masalah kemiskinan, maka dilakukan penelitian untuk mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dikemukakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kurangnya penerapan teknologi di pedesaan.
- 2) Pendidikan yang masih rendah.
- 3) Tingkat pengangguran yang masih tinggi.
- 4) Distribusi pendapatan yang tidak merata.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah kemiskinan di Indonesia memiliki penyebab yang luas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada “Pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan”.

D. Perumusan Masalah

Kemiskinan adalah masalah penting bagi setiap negara, selain itu masalah kemiskinan merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi suatu daerah serta menilai keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan negara termasuk Indonesia.

Salah satu masalah dalam kemiskinan yakni adanya peningkatan pendidikan yang dipresentasikan dari rata-rata lama sekolah. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah tidak menjadikan kemiskinan di Indonesia menurun secara pesat. Kondisi lainnya yakni tingkat pengangguran yang juga masih menjadi masalah di Indonesia juga tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan masalah tersebut, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan terhadap kemiskinan?
- 2) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap kemiskinan?
- 3) Apakah terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan

E. Kegunaan Penelitian

- 1) Kegunaan Teoretis, untuk melatih dan mengembangkan kerangka berpikir ilmiah dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah,

sekaligus untuk menambah bahan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan setiap program pembangunan.

- 2) Kegunaan Praktis, Lembaga atau institusi pendidikan adalah sebagai bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian berikutnya. Kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ekonomi dan Admisitrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.